

MUARA ANGKE SEBAGAI PENOPANG WISATA PESISIR DI KEPULAUAN SERIBU

Enroy Sution¹, Yuwono Prianto², Ismail Rangga Wahana Putra³ & Lenggo Anastasia
Brilliant Gea⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ensu5524@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yuwonop@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ismailranggawahanaputra@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: anastasiagea23@gmail.com

ABSTRACT

Muara Angke, located in the Kepulauan Seribu Regency, holds great potential as a coastal tourism destination, offering significant economic benefits, enhancing connectivity with other tourist regions, and contributing to the resilience of the national economy. However, there are challenges such as environmental sustainability, destination management, and local community participation. This article is composed using an empirical sociological legal research method based on primary data and a qualitative approach. Data collection, processing, and analysis were conducted qualitatively. Data analysis employed the Miles & Huberman model, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The condition of Muara Angke port is considered poor, with inadequate transportation infrastructure, damaged roads, air and water pollution, and coastal challenges being the main obstacles to tourism development in the Kepulauan Seribu region. The low level of education and human resources involved in the tourism sector present their own challenges. Another influential factor is the loss of traditional marine rituals and other cultural practices in the local community of Muara Angke, which could attract tourists. The local government of DKI Jakarta has constructed docks, ports, and Fish Landing Sites (TPI), aiming to reduce the impact of tidal floods and improve transportation in the area. The DKI Jakarta regional government needs to synergize with the North Jakarta city government and the Kepulauan Seribu regency while emphasizing policies through local regulations or gubernatorial regulations that focus on ecosystem preservation and the coastal environment's functionality. This should involve the participation of academic institutions and relevant non-governmental organizations (NGOs). It is important to revive local wisdom that aligns with religious values to enhance the area's attractiveness. Providing training and courses to stakeholders in Muara Angke can improve their competence and enable them to deliver excellent services, thus fostering customer loyalty in the tourism sector.

Keywords: *Muara angke, modern facilities, coastal tourism, tourism promotions*

ABSTRAK

Muara Angke sebagai penopang pariwisata pesisir di kabupaten Kepulauan Seribu mempunyai potensi besar guna memberikan manfaat ekonomi, memperkuat konektivitas dengan wilayah pariwisata lainnya dan berkontribusi dalam membangun resiliensi ekonomi nasional. Namun, terdapat tantangan seperti keberlanjutan lingkungan, pengelolaan destinasi dan juga partisipasi masyarakat setempat. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis yang berbasis data primer dengan menggunakan pendekatan kualitatif. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis data menggunakan model Milles & Huberman dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kondisi pelabuhan Muara Angke tergolong kumuh dan sarana transportasi belum terintegrasi, jalan rusak, polusi udara dan sungai serta pesisir menjadi kendala utama penopang pariwisata ke Kepulauan Seribu. Rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pariwisata merupakan tantangan tersendiri. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah hilangnya ritual pesta laut dan sebagainya masyarakat lokal Muara Angke yang dapat menjadi penarik kunjungan para wisatawan. Pemerintah daerah DKI Jakarta telah membangun dermaga dan pelabuhan serta TPI sehingga dapat mengurangi gangguan banjir rob dan memperindah sekaligus memperlancar transportasi kawasan. Pemda DKI Jakarta perlu mensinergikan pemerintah kota Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus menegaskan kebijakan melalui Perda ataupun peraturan gubernur yang berorientasi pada upaya pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan pesisir dengan menyertakan kalangan kampus maupun LSM terkait. Perlu ditumbuhkembangkan lagi kearifan lokal yang sejalan dengan nilai agama untuk meningkatkan daya tarik kawasan serta pemberian pelatihan dan kursus kepada para pelaku usaha di Muara Angke

untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan prima sehingga terbangun loyalitas para konsumen wisata.

Kata Kunci: Muara angke, fasilitas modern, pariwisata pesisir, promosi pariwisata

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan industri yang terus berkembang dan memiliki potensi yang besar. Pariwisata juga merupakan sektor ekonomi dan bisnis yang dibutuhkan oleh banyak orang, namun kebijakan dan kenyamanan merupakan dukungan utama dalam industri ini. Kepulauan Seribu merupakan daya tarik bagi wisatawan yang ada di DKI Jakarta. Menurut data yang ada, pada Agustus 2022 kemarin ada 4.612 orang wisatawan mancanegara yang tertarik dan berkunjung ke Kepulauan Seribu. Angka berikut menunjukkan bahwa statistik dari pengunjung Kepulauan Seribu meningkat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 2.853 orang wisatawan. Pada Januari 2023 ini Sudin Parekras mencatat ada sebanyak 1.641 wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Pengunjung Kepulauan Seribu meningkat dari tahun ke tahun. Selain didukung oleh potensi pariwisata yang indah dan mempesona, hal ini juga didukung oleh akomodasi serta akses yang tidak sulit untuk berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Muara Angke sebagai daerah pelabuhan pengunjung juga memberikan kontribusi besar bagi sektor pariwisata Kepulauan Seribu. Muara Angke, perkampungan pelabuhan yang terletak di sisi barat pantai utara Jakarta menjadi salah satu tempat yang penting dalam perkembangan pariwisata pesisir. Pariwisata pesisir di Muara Angke dan wilayah Kepulauan Seribu menjadi faktor penopang yang penting dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Pada konsideran menimbang huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dinyatakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa serta peninggalan sejarah seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan sebagai modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kesemuanya itu diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Selanjutnya, dalam penjelasan I. Umum alinea ketiga kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi sehingga pemerintah dan pemerintah daerah maupun dunia usaha pariwisata serta masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang yang dapat ditegakkan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian manusia.

Selanjutnya dalam penjelasan I. Umum alinea ke 5, 6, 7 ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa serta memperhatikan jumlah penduduk sehingga pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman. Sementara itu partisipasi masyarakat di bidang pariwisata terbilang lambat. Padahal pariwisata sekarang ini telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat di berbagai lapisan. Fakta lainnya adalah belum terdapat program interpretasi wisata alam yang terstruktur bagi pengunjung.

Sebagai daerah penopang pariwisata di Kepulauan Seribu, Muara Angke memiliki peran yang krusial dalam menjaga keberlanjutan pariwisata pesisir di wilayah tersebut. Pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke tidak hanya memberikan manfaat ekonomi seperti

peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat setempat, tetapi juga dapat memperkuat konektivitas dengan wilayah pariwisata lainnya seperti Kepulauan Seribu. Dengan memaksimalkan potensi pariwisata di wilayah ini, Muara Angke dapat menjadi penopang yang penting dalam membangun resiliensi ekonomi nasional, dimana sektor pariwisata berfungsi sebagai sumber pendapatan yang stabil dan dapat pulih dengan cepat setelah resesi global terjadi. Dalam perjalanan pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke, terdapat tantangan yang perlu dihadapi, termasuk keberlanjutan lingkungan, pengelolaan destinasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti pengelolaan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, dan promosi pariwisata yang efektif. Oleh karena itu, dalam makalah ini, dilakukan penelitian dan analisis mendalam tentang potensi pariwisata pesisir di Muara Angke dan peran Muara Angke dalam membangun resiliensi ekonomi nasional dalam menghadapi resesi global. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi strategi pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke serta memberikan rekomendasi dan arahan kebijakan yang dapat meningkatkan peran Muara Angke sebagai penopang pariwisata pesisir dalam upaya membangun resiliensi ekonomi nasional.

Penelitian Safrieta Jatu Permatasari dan Dimas Imaniar, menemukan bahwa perilaku manusia berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Aktivitas pariwisata pesisir tanpa standar yang tegas berpeluang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan yang besar.

Rumusan masalah adalah sebagai faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam menjadikan Muara Angke sebagai daerah penopang sektor pariwisata di wilayah Kepulauan Seribu dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam menjadikan Muara Angke sebagai penopang sektor pariwisata di Kepulauan Seribu?

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris sosiologis dimana data primer seperti wawancara dan observasi sebagai sumber utama yang didahului dengan penelusuran dokumen (data sekunder) sebagai bekal untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Informan ditetapkan secara purposive dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami gejala-gejala. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Analisis data juga dilakukan secara kualitatif melalui logika deduktif dengan menggunakan model Milles & Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi melalui analisis isi secara hermeneutik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU No. 10 tahun 2009 menegaskan bahwa destinasi pariwisata memiliki daya tarik pariwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 UU No. 10 tahun 2009 menyatakan bahwa kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal, memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas, memelihara kelestarian dan lingkungan hidup dan juga memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, mematuhi kode etik dunia kepariwisataan dan kesepakatan internasional dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk teori Lawrence M Friedman, sistem hukum meliputi unsur struktur, substansi, dan kultur hukum dimana kultur hukum merupakan kunci atau lebih berperan dibandingkan kedua unsur lainnya. Perilaku merupakan unsur pokok sistem hukum—apa yang sesungguhnya dijalankan orang, tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum (legal behavior) yaitu perilaku yang dipengaruhi oleh aturan keputusan, perintah atau undang-undang, yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum, dimana hal tersebut merupakan *reacting to something, going on in the legal system* yang dapat berupa ketaatan maupun ketidaktaatan terhadap hukum serta reaksi ‘use’ atau ‘not use’ suatu aturan hukum.

Menurut Donald Black, yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem perilaku, hukum cenderung untuk dilibatkan dalam kehidupan sosial dimana bentuk-bentuk pengendalian sosial lainnya lemah atau tidak berdaya. Berkenaan dengan itu, dapat dikemukakan bahwa lemahnya kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan sebagai sistem pengendalian sosial menuntut/mengharuskan diberlakukannya kaidah hukum. Hal tersebut seharusnya tidak serta merta seperti itu, mengingat bahwa suatu kaidah hukum ada yang bersifat mengatur dan ada pula yang bersifat memaksa, padahal sejatinya yang bersifat esensial adalah kaidah hukum yang bersifat mengatur, sementara kaidah hukum yang bersifat memaksa seperti misalnya hukum pidana lebih merupakan *ultimum remedium*.

Kehidupan warga masyarakat Muara Angke yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan terkondisikan untuk bersikap pragmatis dalam menjalani kehidupan, sehingga dalam kesadaran mereka berbagai hal yang diyakini sebagai kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kesopanan secara berangsur-angsur mengalami erosi dalam sistem keyakinan mereka. Waktu yang dimiliki difokuskan untuk mencari cara dalam bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan kehidupan ibukota yang menuntut keahlian tinggi, kemampuan membangun relasi di tengah-tengah himpitan tambahan penduduk akibat migrasi dari daerah lain situasi tersebut kerap kali membuat mereka menempuh jalan pintas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya sehingga nilai-nilai ideal, luhur yang menjadi esensi kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan secara sadar atau tidak sadar dikesampingkan.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dapat menghambat pembangunan serta keberlangsungan Muara Angke sebagai daerah penunjang pariwisata. Kondisi sekitar pelabuhan Muara Angke masih tergolong kumuh dan belum terintegrasi untuk menunjang banyaknya penumpang secara fisik. Kondisi jalan sekitar yang masih rusak dan juga polusi udara dari bau-bau pengasinan ikan di sekitar pelabuhan sangatlah kuat. Mengenai limbah kapal, mereka tidak menjelaskan secara rinci dan mereka menganggap bahwa limbah yang ada selama ini tidak parah dan tidak terlalu mencemarkan lingkungan. Hal ini belum memenuhi prinsip yang ditetapkan ketentuan Pasal 5 (d) yakni memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah juga merupakan faktor penghambat perekonomian ataupun keberlangsungan pariwisata di Muara Angke dari segi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah ini juga membuat batasan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar. Sebanyak 12.471 orang di Muara Angke yang bekerja sebagai nelayan, salah satu faktor dari banyaknya masyarakat yang menjadi nelayan adalah tingkat pendidikan yang rendah, padahal jika diberikan pelatihan dan pendidikan yang baik, masyarakat-masyarakat ini dapat bekerja ataupun berwirausaha di bidang ekonomi kreatif salah satunya adalah pariwisata.

Masalah yang terkadang dihadapi adalah membludaknya penumpang, tapi kadangkala kapal yang tersedia untuk tujuan pariwisata kurang dan juga terkadang cuaca menjadi kendala transportasi laut yang menyebabkan (*delay*) atau pembatalan perjalanan.

Sementara itu, acara pesta laut yang merupakan ritual unik masyarakat pesisir di wilayah Muara Angke belum lagi diselenggarakan padahal acara pesta laut tersebut dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menyaksikannya. Acara tersebut terakhir diselenggarakan tahun 2018. Pesta Laut juga acara-acara lain yang merupakan kearifan lokal masyarakat Muara Angke perlu terus didorong kelestariannya walaupun dalam beberapa sisi dapat menumbuhkan salah paham bagi sekelompok masyarakat yang menganggap kegiatan tersebut berbau syirik dan bertentangan dengan prinsip tauhid dalam ajaran agama Islam. Hal ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan para tokoh agama setempat sehingga dapat ditempuh jalan tengah dengan menerapkan pendekatan kebudayaan sebagaimana dulu dilakukan oleh Wali Songo dalam melakukan syiar agama Islam melalui reinterpretasi fenomena tertentu sehingga segala sesuatunya sesuai dengan aqidah dan prinsip tauhid dalam agama Islam.

Perahu-perahu yang digunakan sebagai sarana penyebrangan laut ke Kepulauan Seribu perlu dibenahi tampilannya dan kenyamanannya sehingga meningkatkan daya tarik para wisatawan untuk mau menggunakan perahu-perahu nelayan di Muara Angke sebagai sarana transportasi laut menuju Kepulauan Seribu. Disamping itu, faktor keselamatan penumpang harus menjadi fokus utama para pemilik perahu juga pengelola pelabuhan Muara Angke dengan memastikan ketersediaan alat keselamatan seperti pelampung dan sebagainya maupun pemeriksaan secara berkala motor tempel yang digunakan sehingga bisa berfungsi dengan maksimal dan meminimalisasi sekecil mungkin pencemaran udara maupun pencemaran laut.

Sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf (a) PERDA DKI Jakarta no 6 tahun 2015 dalam rangka meningkatkan daya saing kota Jakarta di tingkat global, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan secara lebih sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pada ketentuan (1) dan (7) PERDA No. 6 tahun 2015, ditegaskan bahwa kepariwisataan bersifat multidimensi dan multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, dan seterusnya. Ketentuan pasal 1 angka (10) huruf (a) PERDA No. 6 tahun 2015 mengedepankan peran masyarakat dalam kegiatan pariwisata dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Charles Sampford menawarkan paradigma ketidakteraturan (*disorder of law*), dimana hukum dipandang sebagai suatu yang bersifat "*melee*", cair, mengalir (*fluid*) yang tidak mempunyai format formal atau struktur yang pasti dan kaku. Hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial ataupun kehidupan hukumnya bersifat *melee*, bersifat asimetris. Temuan-temuan penelitian Safrieta Jatu Permatasari dan Dimas Imaniar tersebut diatas juga terjadi di lingkungan Muara Angke dengan intensitas yang lebih tinggi karena sudah semenjak lama kondisi lingkungan Muara Angke terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan secara masif dimana kondisi air sungai saat dilakukan pengamatan dalam keadaan hitam dan menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat hidung, pohon-pohon besar juga sudah tidak terlihat, artinya pembabatan hutan di sekitar Muara Angke sudah terjadi sejak lama, walaupun ditemukan hanya beberapa sehingga kondisi di sekitar Muara Angke terasa sangat panas terutama saat siang hari.

Berbagai bentuk ketidakteraturan yang pernah mewarnai kehidupan seputar Muara Angke dimana setiap individu yang hidup di lingkungan Muara Angke secara umum lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan terpola pada sikap hidup yang pragmatis dan cenderung menghalalkan cara dalam mencapai tujuan secara bertahap ditangani dengan memberlakukan berbagai macam kebijakan pemerintah sebagai implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk secara bersama-sama menata kehidupan di lingkungan pelabuhan Muara Angke.

Sebagai wilayah yang memiliki potensi besar dalam penyelenggaraan pariwisata pesisir terutama bagi Kepulauan Seribu, pemerintah dan berbagai lembaga tentunya melakukan sedikit banyak aksi yang bisa memanfaatkan potensi Muara Angke. Salah satu hal yang terlihat adalah pembangunan infrastruktur seperti hal yang sudah disebutkan, Pemerintah membangun pelabuhan baru bertaraf internasional yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas modern untuk menunjang pengembangan pariwisata pesisir di Muara Angke. Pemerintah juga ikut andil dalam mengatur pengelolaan dan pemeliharaan Muara Angke. Hal ini mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan, pengaturan lalu lintas wisatawan serta peningkatan kualitas layanan pariwisata. Pihak terkait seperti Suku dinas pariwisata dan ekonomi kreatif juga berperan dalam mengawasi dan mengelola kegiatan di wilayah Muara Angke.

Untuk pemda banyak melakukan inspeksi keselamatan, Pemerintah juga membangun dermaga baru untuk menjaga kualitas dan keamanan pelabuhan, pemerintah juga membangun lagi pelabuhan dengan bagus agar sektor pariwisata di Muara Angke bisa mencapai standar internasional yang dapat menunjang dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata di Muara Angke sebagai jalur penyebrangan lain selain Ancol yang banyak dijadikan tempat penyebrangan utama di DKI Jakarta. Kontribusi dari LSM dsb tidak dijelaskan oleh narasumber, namun kadangkala narasumber-narasumber mengatakan ada mahasiswa/i yang kadangkala datang memberikan edukasi dan melakukan wawancara hanya sekedar untuk penelitian. BUMN seperti BRI juga memiliki kontribusi untuk sektor pariwisata di M. Angke untuk menunjang pariwisata Kep. Seribu, BRI menyediakan kapal ATM yang dapat digunakan atau 'ngider' di laut ataupun ke pulau2 sekitar agar penyediaan uang tunai demi keberlanjutan sektor ekonomi di Kep. Seribu dapat ditunjang dengan baik dan uang dapat tersebar dan tercukupi oleh turis-turis maupun pengusaha2 di samudera maupun pulau sekitarnya.

Regulasi yang mengatur keberlangsungan industri pariwisata di Muara Angke diantaranya pengelolaan destinasi pariwisata, perlindungan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat lokal tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2023.

Pengembangan pariwisata diintegrasikan dengan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Ada pula ,Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2025 yang merupakan panduan untuk pengembangan pariwisata di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Muara Angke dan Kepulauan Seribu.

Daerah yang luas ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang pariwisata pesisir. Sebagai upaya dari kenyamanan keberlangsungan sektor pariwisata di Muara Angke ini, sedang dibangun pelabuhan baru nan modern di Muara Angke. Pelabuhan penumpang bertaraf internasional yang diharapkan dapat menarik lebih lagi wisatawan melalui

Muara Angke dibangun diatas lahan 6.700-meter yang dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti e-ticketing, lift, dll.

Dermaga baru yang tinggi dan bebas dari pasang juga sudah dibangun kurang lebih dalam setahun terakhir dikarenakan meningkatnya penumpang yang menyeberang ke kepulauan seribu melalui pelabuhan Muara Angke ini. Penyeberangan ke kepulauan Seribu melalui pelabuhan Muara Angke ini terintegrasi melalui online ticketing dan pembatasan penumpang yang jelas dan teratur sehingga tidak terjadi *over-capacity* yang berbahaya, diharapkan kedepannya wisata pesisir di DKI Jakarta ini akan meningkat dan Muara Angke menjadi salah satu pilar dari sektor industri yang siap dalam menghadapi resesi dan tantangan berbagai ekonomi kedepannya.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengatur pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta, termasuk Muara Angke dan Kepulauan Seribu bertujuan melindungi keanekaragaman hayati, mempromosikan keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat pengelolaan pariwisata di wilayah tersebut.

Pemerintah juga menyediakan ojek-ojek atau transportasi laut yang relatif terjangkau di Muara Angke. Harga tiket penyeberangan dari Muara Angke hanya berkisar di Rp.40.000, - sampai Rp.86.000, -, harga tersebut tergolong relatif lebih murah dibandingkan harga penyebrangan via pantai marina Ancol yang berkisar dari Rp.125.000, -++ ,menyebabkan banyak dari wisatawan yang memilih menyebrang melalui Muara Angke.

Guna mengembangkan dan mempertahankan sektor pariwisata di Muara Angke, banyak juga tour dan travel yang mengadakan kerjasama dengan ojek-ojek kapal setempat untuk mengantar wisatawan-wisatawan , bentuk kerjasama ini berupa paket pariwisata ke kepulauan seribu , harga paket pariwisata dibanderol di angka Rp.400.000, - ++ tergantung pulau tujuan. Bentuk kerjasama ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan wisata pesisir dan juga membantu masyarakat sekitar dengan cara menambah lapangan pekerjaan serta banyak juga warga lokal yang bekerja sebagai pemandu wisata.

Salah satu produk pariwisata unggulan di kawasan Muara Angke adalah Resto Apung yang dibangun dengan standar nasional dan menampung kegiatan usaha sekitar 60 warga masyarakat sekitar Muara Angke, sementara di depan gerbang terdapat 20 kios yang menjajakan berbagai macam aneka kuliner sehingga pengunjung dapat memilih jajanan yang mereka inginkan. Hal yang menarik adalah pemerintah DKI Jakarta mampu menampung kepentingan berbagai pihak dan dapat menegakkan ketertiban secara persuasif sehingga praktek-praktek 'premanisme' yang biasanya banyak ditemui di lingkungan pelabuhan dapat ditangani secara baik dan membuat nyaman pengunjung karena tidak harus mengeluarkan biaya tambahan. Untuk itu pihak UP3 menyediakan sarana pengaduan dan melakukan patroli secara rutin untuk menjaga ketertiban lingkungan masyarakat sekitar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi pelabuhan Muara Angke tergolong kumuh dan sarana transportasi belum terintegrasi, jalan rusak, polusi udara dan sungai serta pesisir menjadi kendala utama penopang pariwisata ke Kepulauan Seribu. Rendahnya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pariwisata merupakan tantangan tersendiri. Berbagai kendala ditangani dengan menerapkan kebijakan pro-rakyat dengan menyertakan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menata lingkungan pelabuhan Muara Angke menjadi kondusif.

Pembangunan pelabuhan baru dan restoran apung telah mempertemukan berbagai macam kepentingan warga masyarakat lokal Muara Angke menjadi menarik kunjungan para wisatawan.

Pemda DKI Jakarta perlu mensinergikan pemerintah kota Jakarta Utara dan kabupaten Kepulauan Seribu sekaligus menegaskan kebijakan melalui Perda ataupun peraturan gubernur yang berorientasi pada upaya pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan pesisir dengan menyertakan kalangan kampus maupun LSM terkait. Perlu ditumbuhkembangkan lagi kearifan lokal yang sejalan dengan nilai agama untuk meningkatkan daya tarik kawasan serta pemberian pelatihan dan kursus kepada para pelaku usaha di Muara Angke untuk meningkatkan kompetensi mereka agar dapat memberikan layanan prima sehingga terbangun loyalitas para konsumen wisata pesisir.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta perlu mensinergikan serta membudayakan koordinasi antara kota Jakarta Utara dengan pemerintah kabupaten Kepulauan Seribu sehingga penyelenggaraan pariwisata pesisir di kedua wilayah tersebut setidaknya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih dari itu dapat menumbuhkan loyalitas wisatawan sebagai konsumen bidang kepariwisataan, karena mereka telah mengalami pengalaman yang istimewa selama menikmati objek pariwisata di kedua wilayah tersebut dan secara sukarela menyebarkan potensi yang ada melalui media sosial dan sebagainya.

Keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam bidang kepariwisataan di wilayah Muara Angke khususnya Jakarta Utara serta Kepulauan Seribu pada umumnya perlu ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan khusus dan sebagainya sehingga mereka bisa memberikan layanan prima kepada para pengunjung. Sementara itu, bagi para pedagang kuliner di Muara Angke juga kepulauan eribu perlu diarahkan untuk menyuguhkan kuliner khas pesisir dan mengurangi sebisa mungkin makanan siap saji yang secara umum kurang sehat dan memberikan kesan mendalam tentang rasa dan eksotisme kuliner yang menjadi salah satu kekuatan penunjang kepariwisataan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti kampus dan LSM untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor pariwisata di Muara Angke dan Kepulauan Seribu yang pada gilirannya akan meningkatkan animo masyarakat untuk berkunjung sehingga dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat sekitar.

Lebih dari itu, hal yang paling mendasar untuk diimplementasikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta sehingga pengurus RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Muara Angke dan Kepulauan Seribu adalah menumbuhkembangkan kearifan lokal yang bertumpu pada nilai-nilai agama sehingga pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi alam di wilayah Muara Angke dan Kepulauan Seribu tepat mengarah pada pelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan wilayah pesisir sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Titik yang paling mendesak adalah mengkondisikan kondisi sungai dan muara dapat dipulihkan sedemikian rupa sehingga tingkat pencemaran air dengan kadar COD & BOD yang tinggi dapat dikembalikan sesuai standar yang berlaku sehingga biota laut di sungai dan pesisir Muara Angke dapat tumbuh dan berkembang kembali secara optimal.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ini.

REFERENSI

- Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence), termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Prenada Media Group.
- Ato, S. (2022, Oktober 14). Wajah baru pelabuhan muara angke. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/10/06/wajah-baru-pelabuhan-muara-angke>.
- Fadjar, A.M. (2016). *Teori-teori hukum kontemporer edisi revisi*. Setara Press.
- Fadlurrohman, F. (2022, November 15). Pesta laut di muara angke. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/foto/2022/11/15/pesta-laut-di-muara-angke> 15 November 2022
- Hamonangan, J. (2022, September 20). Wisata kepulauan seribu, kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 meningkat 50 persen. *Wartakota*. <https://wartakota.tribunnews.com/2022/09/20/wisata-kepulauan-seribu-kunjungan-wisatawan-an-mancanegara-tahun-2022-meningkat-50-persen>.
- Heryati, Y. (2019). Potensi pengembangan obyek wisata pantai Tapandullu di kabupaten Mamuju. *Growth Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 56-74.
- Kudus, P. W. (2023, Februari 25). *Nasib nelayan kita: Miskin, berpendidikan rendah, terabaikan negara*. Alinea.id. <https://www.alinea.id/nasional/pendidikan-nelayan-yang-diabaikan-jokowi-b2hMc9KGU>.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- Permatasari, S. J., & Imaniar, D. (2021). Kajian Perilaku masyarakat pesisir yang berdampak pada perekonomian masyarakat (studi kasus di desa Jangkar, kecamatan Jangkar, kabupaten Situbondo). *Journal of Aquaculture Science*, 6, 189-197.
- Putra, E. P. (2021, November 09). Tarif naik kapal ke kepulauan seribu dari ancol rp.125 ribu. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/r2ag60484/tarif-naik-kapal-ke-kepulauan-seribu-dari-an-col-rp-125-ribu>.
- Suardana, I. W., & Dewi, N. G. A. S. (2015). Dampak pariwisata terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir karangasem: pendekatan pro poor tourism. *Piramida*, 11, 76-87.
- Yusrini, L., & Eviana, N. (2019). Perencanaan program interpretasi wisata alam berbasis konservasi mangrove di taman wisata alam mangrove angke kapuk Jakarta. *Eduturisma*, 4(1).
- Thalib, M. A. (2022). Pelatihan analisis data model miles dan huberman untuk riset akuntansi budaya. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 5(1), 23-33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.